



Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024



Aktivitas Pasar Tradisional



Aktivitas pelayanan tera



Aktivitas Cor Kuningan



Aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL)

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 143 Telp.
JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan acuan perencanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026. Adapun penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sebagai salah satu hasil rewiu internal, serta dokumen pendukung lainnya. Sejalan dengan rewiu internal terhadap Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Renstra, serta Isu Strategis OPD.

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang pada tahun 2024 merupakan perencanaan jangka pendek yang melaksanakan program kerja pembangunan Sektor Perdagangan dan Sektor Perindustrian.

Dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender yang tertuang dalam pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan acuan dalam perencanaan kedepan sehingga dapat mendukung keberhasilan kegiatan pembangunan dibidang perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Jombang serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Jombang, 12 Juli 2023

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JOMBANG



Drs. SUWIGNYO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196601161992031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	18
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	20
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	22
3.3. Program dan Kegiatan	23
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
BAB V PENUTUP	35

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut sebagai RENJA SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang yang ditetapkan setiap tahun. RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024. Disamping itu juga menjadi pedoman penyusunan Renja RKPD Tahun 2024. RKPD Tahun 2023 menjadi dasar perumusan tujuan jenis kegiatan, kelompok sasaran, hasil, manfaat dan lokasi serta prakiraan maju berdasarkan pada prioritas, sasaran, program dan pagu indikatif yang telah ditentukan dan selanjutnya akan disusun ke dalam Renja SKPD Tahun 2024 serta memperhatikan keselarasan dan konsistensinya terhadap Renstra SKPD.

Penyusunan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Renja Tahun 2019.

Keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat memerlukan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah memperhatikan 10 Asas Umum Penyelenggaraan Negara, sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang selaras dengan tujuan Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Sejahtera, adil dan makmur menggambarkan tentang pemerataan pembangunan diseluruh Kabupaten Jombang. Dimana sekarang ini Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 yaitu **“Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Industri Agribisnis dan Pembangunan Wilayah”**. Dari sisi kemandirian dan kesejahteraan, tidak hanya bisa dilihat dari kemampuan menghidupi diri sendiri dan kemampuan batiniah dan lahiriah (ekonomi). Ini semua dikarenakan masuknya era globalisasi yang bermakna persaingan sudah tidak lagi melibatkan sumber daya internal (lokal), tetapi sudah melibatkan sumber daya eksternal.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mendukung Tema Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 yaitu **“Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan Guna Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Agribisnis dan SDM Unggul”**. Melalui kebijakan Revitalisasi Pasar, Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah, dan Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industri, dengan indikator sasaran Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan. Dalam rangka menganalisis perkembangan situasi dan kondisi Dinas Perdagangan dan Perindustrian beberapa tahun ke depan, maka perlu dirumuskan isu-isu strategis yang sebagaimana permasalahan berdasarkan urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun rencana.

Kegiatan pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 dilaksanakan Dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melaksanakan tema pembangunan ke-3 yaitu **Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah** dalam kegiatan strategis daerah yaitu Revitalisasi/Permbangunan Infrastruktur Ekonomi (Revitalisasi/Pembangunan Lanjutan Pasar) dan Penuntasan Penataan Junction Local Street Food/Sentra Pedagang Kaki Lima (Penataan Sentra Kuliner bagi PKL).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 75 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di sektor perdagangan dan Industri;
3. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama yang sesuai dengan arah kebijakan dari kegiatan yang telah disepakati bersama di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK, SPM, SDGs, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh, yakni melalui usulan pemangku kepentingan dalam usulan prioritas kecamatan dan, usulan melalui forum renja Perangkat Daerah.
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- Rencana Program dan Kegiatan Dengan Dana Indikatif
- Rencana Program dan Kegiatan Dalam Pengarustamaan Gender (PUG)
Melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Disdagrin ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Disdagrin dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Disdagrin, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Jombang dan Dana Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Timur. Pada tahun anggaran 2022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.324.659.186 dengan rincian belanja tidak langsung senilai Rp. 7.801.116.106 dan belanja langsung senilai Rp. 105.523.543.080 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung dan terealisasi sebanyak Rp. 89.816.915.367 atau tercapai sebesar 79,26% dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara itu, belanja yang berasal dari anggaran non APBD tercapai sebesar 91,23%. Anggaran Tahun 2022 didukung atas 10 program, 21 kegiatan dan 46 subkegiatan. Selain dari APBD, Disdagrin juga mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung dari DAK-Fisik senilai Rp. 26.252.514.000 (pagu awal) namun pagu kontrak sebesar Rp. 22.990.317.760 dan terealisasi sebagaimana pagu kontrak atau tercapai sebesar 100%; DAK-Non Fisik senilai Rp. 2.460.703.000,00 dan terealisasi sebanyak Rp. 2.154.084.998 atau tercapai sebesar 87,54%; DID senilai Rp. 2.680.000.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 2.627.979.831 atau tercapai sebesar 98,06%; DBHCHT senilai Rp. 76.156.850 dan terealisasi sebagaimana besaran target atau tercapai

sebesar 100%; serta BK-Propinsi Jatim senilai Rp. 15.000.000.000 dan terealisasi sebanyak Rp. 10.579.823.335 atau tercapai sebesar 70,53%.

Pada tabel T-C.20 disajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Disdagrin dan pencapaian renstra Disdagrin s/d tahun 2023.

Adapun evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2023 adalah :

Tabel T-C.20
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4		
	Urusan Pilihan					82,032,688,876		62,160,883,183				25,263,438,169				
	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan															
3.30	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	300 %	100 %	100 %	11,087,704,557	50.00 %	9,846,759,443	50.00 %	88.81	100 %	10,753,541,229	250.00 %	83.33	
3.30	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	300 %	100 %	100 %	3,965,000	100 %	3,979,000	100.00 %	100	100 %	12,053,700	300.00 %	100	
3.30	01	01	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	5 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2,068,600	2 dokumen	2,062,600	100.00 %	100	-	5,387,650	5.00	100
			Jumlah dokumen perencanaan PD	3 dokumen								3 dokumen	-	3.00 dokumen	100	
3.30	01	06	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	10 laporan	5 laporan	5 dokumen	1,916,400	5 dokumen	1,916,400	100.00	100	-	6,666,050	10.00	100
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan								5 laporan	-	5.00 laporan	100	
3.30	01		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	300 %	100 %	100 %	8,951,919,695	100.00 %	7,801,116,106	100.00 %	87.14	100 %	8,979,689,929	300.00 %	100
3.30	01	01	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang difasilitasi	28 bulan	14 bulan	14 bulan	8,649,368,445	14 bulan	7,500,374,856	100.00	86.72	-	8,646,246,179	28.00	100
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang/bulan								66 orang/bulan	-	66.00 orang/bulan	100	
3.30	01	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan serta Tim Pemeriksa Barang dan Jasa yang terbayar	24 bulan	12 bulan	12 bulan	301,516,500	12 bulan	299,706,500	100.00	99.40	-	331,944,000	24.00	100
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen								12 dokumen	-	12.00 dokumen	100	
3.30	01	05	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	34 laporan	17 laporan	-	-	-	-	-	-	499,800	17.00	50	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan							17 laporan	-	17.00 laporan	100				
3.30	01	06	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	34 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1,034,750	1 dokumen	1,034,750	100.00	-	100	999,950	2.00	5.88	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan								#DIV/0!	1 laporan	-	1.00 laporan	100		
3.30	01	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	-	-	100 %	-	- %	-	-	#DIV/0!	-	17,493,800	-	0	
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100 stel				-	-	#VALUE!	#DIV/0!		-	-	0		
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	250 orang			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0		
3.30	01	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	4 laporan	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	4 laporan	17,493,800	4.00	100	
3.30	01	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	200 %	100 %	-	-	20,100,000	100 %	20,100,000	#DIV/0!	100	-	-	200.00	100	
3.30	01	01	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kualitasnya	250 orang			-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	0		
3.30	01	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	502 orang	67 orang	67 orang	20,100,000	67 orang	20,100,000	100.00	100			134.00	26.69	
3.30	01	10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi pemberantasan cukai ilegal	400 orang	400 orang	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	400.00	100	
3.30	01	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	300 %	100 %	100 %	100 %	832,191,654	100 %	816,298,953	100.00 %	98.09	100 %	635,861,600	300.00 %	100	
3.30	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	1054 jenis	527 jenis	527 jenis	26,885,354	527 jenis	26,845,200	100.00	-	100	-	33,212,400	1,054.00	100

Kode			Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 paket			-			#DIV/0!	#DIV/0!	26 paket	-	26.00 paket	100			
3.30	01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	6282 jenis	3,180 jenis	1,570 jenis	51,978,100	1,570 jenis	51,907,312	100.00	-	100	-	54,768,500	4,750.00	-	75.61
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	64 paket			-				#DIV/0!	#DIV/0!	64 paket	-	64.00 apket	100		
3.30	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga perangkat daerah yang terfasilitasi	64 jenis	32 jenis	32 jenis	6,449,000	32 jenis	6,417,500	100.00	-	100	-	-	64.00	-	100
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan								#DIV/0!	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!		
3.30	01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang terfasilitasi	1162 jenis	620 jenis	581 jenis	193,540,300	581 jenis	192,545,050	100.00	-	99.49	-	162,041,750	1,201.00	-	103.36
			Jumlah bahan bakar minyak yang terfasilitasi	29,318 liter	13,200 liter	16,118 liter			16,118 liter		100.00	-	#DIV/0!	-	-	29,318.00	-	100
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket			-				#DIV/0!	#DIV/0!	5 paket	-	5.00 paket	100		
3.30	01	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetak	105,154 buku	52,500 buku	57,897 buku	287,930,900	57,897 buku	275,793,450	100.00	-	95.78	-	273,390,950	110,397.00	-	104.99
			Jumlah pemenuhan barang penggandaan	198,127 lembar	67,700 lembar	32,727 lembar			32,727 lembar		100.00	-	#DIV/0!	-	-	100,427.00	-	50.69
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket							#DIV/0!	#DIV/0!	17 paket	-	17.00 paket	100		
3.30	01	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	102 buah	51 buah	51 jenis	171,556,000	51 jenis	170,030,000	100.00	-	99.11	-	60,128,000	102.00	-	100
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen							#DIV/0!	#DIV/0!	2 dokumen	-	2.00 dokumen	100		
3.30	01	09	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 kali	25 kali	15 kali	93,852,000	15 kali	92,760,441	100.00	-	98.84	-	52,320,000	40.00	-	80
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 laporan							#DIV/0!	#DIV/0!	27 laporan	-	27.00 laporan	100		
3.30	01		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	200 %	100 %	100 %	64,435,000	100 %	63,869,000	100.00	-	99.12	-	-	200.00	-	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4				
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbeli	1 unit					-	#DIV/0!	#DIV/0!			-	0			
		Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor yang terbeli	4 unit					-	#DIV/0!	#DIV/0!			-	0			
3.30	01	10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras gedung kantor	66 unit	9 %	9 unit	64,435,000	9 unit	63,869,000	100.00	99.12		18.00	27.27			
XX	01	11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarpras pendukung gedung kantor (papan sentra IKM)	3 unit	n/a			-	#DIV/0!	#DIV/0!			-	0			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit						#DIV/0!	#DIV/0!			-	#DIV/0!			
3.30	01		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah	300 %	100 %	100 %	759,499,200	100 %	712,242,136	100.00 %	93.78	100 %	795,067,200	300.00 %	100		
3.30	01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 bulan	24 bulan	12 bulan	359,880,000	12 bulan	325,976,099	100.00	-	90.58	-	321,000,000	36.00	-	150
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan						#DIV/0!	laporan	#DIV/0!	3 laporan	3.00	laporan	100		
3.30	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat standar ukur yang terkalibrasi	420 unit	420 unit					#DIV/0!	#DIV/0!		420.00	100			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan						#DIV/0!	laporan	#DIV/0!	3 laporan	3.00	laporan	100		
3.30	01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	4 jenis	2 jenis	2 jenis	399,619,200	2 jenis	386,266,037	100.00	-	96.66	-	474,067,200	4.00	-	100
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan						#DIV/0!	laporan	#DIV/0!	2 laporan	2.00	laporan	100		
3.30	01		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	240 %	160 %	80 %	455,574,008	80 %	429,154,248	100.00 %	94.20	80 %	313,375,000	320.00 %	133.33		
3.30	01	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 unit	1 unit	1 unit	20,077,200	1 unit	19,785,000	100.00	-	98.54	-	38,610,000	2.00	-	100
			Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dibayarkan pajaknya	2 unit	1 unit	1 unit			1 unit		100.00	#DIV/0!	-	-	2.00	100		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit							#DIV/0!	unit	#DIV/0!	1 unit	1.00	unit	100	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10 = (5+7+9)	11=10/4									
3.30	01	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	92 unit	46 unit	38 unit	117,442,000	38 unit	92,416,500	100.00	-	78.69	-	-	238,215,000	84.00	-	91.30
			Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	76 unit	38 unit	46 unit	-	46 unit	100.00	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	84.00	-	110.53
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit					#DIV/0!	unit	#DIV/0!	46 unit					46.00	unit	100
3.30	01	02	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel kantor	76 unit	53 unit					#DIV/0!	#DIV/0!					53.00		69.74
3.30	01	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya perangkat daerah yang dipelihara	3 unit	1 unit	1 unit	239,945,008	1 unit	238,943,398	100.00	100					2.00		66.67
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit					#DIV/0!	#DIV/0!	- unit						-		0.00
3.30	01	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	155 unit	65 unit	90 unit	78,109,800	unit	78,009,350	-	-	100	-	-	36,550,000	65.00	-	41.94
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 unit					#DIV/0!	unit	#DIV/0!	90 unit					90.00	unit	100
30	02		Program perijinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan	300 %	100 %	100 %	2,026,450	100 %	2,026,450	100.00 %	100	100 %			14,635,200	300.00 %		100
30	02		Kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan	Jumlah rekomendasi ijin usaha toko swalayan (IUTS) yang diterbitkan	16 rekomend asi ijin usaha	10 rekomend asi ijin usaha	14 rekening	675,250	17 rekening	675,250	121.43 rekomend asi ijin usaha	100	4 rekomend asi ijin usaha	5,715,600			31.00 rekomend asi ijin usaha		193.75
30	02	01	Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha secara terintegrasi secara elektronik	Jumlah berkas ijin usaha (IUTS) yang diverifikasi	12 rekomend asi ijin usaha	10 rekomend asi ijin usaha	14 rekomend asi ijin usaha	675,250	17 rekomend asi ijin usaha	675,250	121.43	-	100	-	-	5,715,600	27.00	-	225
			Jumlah survey lokasi ijin usaha	8 kali	10 kali	14 kali			7 kali		50.00	-	#DIV/0!	-	-		17.00	-	212.5
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 dokumen							#DIV/0!	dokumen	#DIV/0!	4 dokumen			4.00 dokumen		100
30	02		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah rekomendasi ijin usaha Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan	16 rekomend asi ijin usaha	17 rekomend asi ijin usaha	18 rekomend asi ijin usaha	682,250	18 rekomend asi ijin usaha	682,250	100.00 rekomend asi ijin usaha	100	8 rekomend asi ijin usaha	4,119,800			43.00 rekomend asi ijin usaha		268.75
30	02	01	Sub Kegiatan Fasilitas penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah berkas ijin usaha (TDG) yang diverifikasi	8 rekomend asi ijin usaha	17 rekomend asi ijin usaha	18 rekomend asi ijin usaha	682,250	18 rekomend asi ijin usaha	682,250	100.00	-	100	-	-	4,119,800	35.00	-	437.5

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4			
		Jumlah survey lokasi ijin usaha	8 kali	17 kali	14 kali		17	-	121.43	-	#DIV/0!	-	34.00	425			
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	8 dokumen						8.00 dokumen	#DIV/0!	8 dokumen		#VALUE!	#VALUE!			
30	02	Kegiatan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan	16 rekomend asi ijin usaha	9 rekomend asi ijin usaha	6 rekomend asi ijin usaha	668,950	6 rekomend asi ijin usaha	668,950	100.00 rekomend asi ijin usaha	100	6 rekomend asi ijin usaha	4,799,800	21.00 rekomend asi ijin usaha	131.25		
30	02	01	Sub Kegiatan Fasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah berkas ijin usaha (STPW) yang diverifikasi	10 rekomend asi ijin usaha	9 rekomend asi ijin usaha	6 rekomend asi ijin usaha	668,950	6 rekomend asi ijin usaha	668,950	100.00	-	100	-	4,799,800	15.00	150
			Jumlah survey lokasi ijin usaha	8 kali	9 kali	6 kali		-	-	-	-	#DIV/0!	-	9.00	-	112.5	
			Menurunnya rokok yang didentifikasi ilegal (DBHCHT)	15 merek rokok			-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	5 merek rokok	-	5.00		33.33	
			Jumlah rokok yang disampling	24 sampel			-		-	#DIV/0!	#DIV/0!	80 sampel	-	80.00		333.33	
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	6 dokumen						#DIV/0! dokumen	#DIV/0!	6 dokumen		6.00 dokumen		100	
30	03	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah	300 %	114.54 %	100 %	44,621,577,919	100.00 %	40,004,744,728	100.00 %	89.65	100 %	13,596,435,140	314.54 %	104.85		
			Tingkat kepuasan terhadap layanan sarana distribusi perdagangan	77 %	77 %	77 %	-	77 %		100.00 %	#DIV/0!	77 %	-	231.00 %	300		
30	03	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah penyediaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi	48 pasar daerah	16 pasar daerah	17 rekening	41,737,911,480	17 rekening	37,248,734,178	100.00 pasar daerah	89.24	16 pasar daerah	13,480,287,088	49.00 pasar daerah	102.08		
			Jumlah PAD Retribusi	12,182,878,918 rupiah	4,360,214,380 rupiah	4,092,056,140 rupiah	-	4,152,390,154 rupiah		105.18 rupiah	#DIV/0!	4,092,056,140 rupiah	-	11,005,056,048.00 rupiah	115.19		
30	03	01	Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar daerah yang direvitalisasi	9 pasar daerah	11 pasar daerah	11 pasar daerah	41,719,161,580	8 pasar daerah	37,230,124,178	72.73	-	89.24	-	10,972,649,000	19.00	211.11
			Jumlah laporan hasil koordinasi lintas sektoral dan stakeholder	0 laporan	6 laporan					#DIV/0!	#DIV/0!			6.00		#DIV/0!	
			Jumlah prasarana distribusi perdagangan yang tercukupi	700 unit	370 unit	32 unit		32 unit		100.00	-	#DIV/0!	-	402.00	-	57.43	
			Jumlah peserta sosialisasi pasar yang akan direvitalisasi	350 orang	756 orang	756 orang		756 orang		100.00	-	#DIV/0!	-	1,512.00	-	432	
			Pengadaan lahan relokasi untuk prasarana pelaku usaha informal	2 bidang	2 bidang					#DIV/0!	#DIV/0!			2.00		100	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	18 unit						#DIV/0! unit	#DIV/0!	18 unit		18.00 unit		100	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4
30 03 02	Sub Kegiatan Fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	28 laporan	14 laporan	14 laporan	16,749,900	14 laporan	16,610,000	100.00	99.25		2,507,638,088	28.00	100
		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16 unit						#DIV/0!	#DIV/0!	16 unit		16.00 unit	100
30 03	Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar	77 %	77 %	77 rekening	2,883,666,439	77 rekening	2,756,010,550	100.00 %	95.57	77 %	115,148,052	231.00 %	300
30 03 01	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah peserta pelatihan pengelola sarana distribusi perdagangan	300 orang	1,470 orang	2,268 orang	405,613,650	2,668 orang	378,334,650	117.64	- 93.27	- -	115,148,052	4,138.00	- 1379.33
		Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelayanan retribusi pasar daerah	24 laporan	112 laporan	12 laporan		12 laporan		100.00	- #DIV/0!	- -		124.00	- 516.67
		Jumlah dokumen kerjasama mitra strategis untuk pasar daerah	1 dokumen						#DIV/0!	#DIV/0!			-	0
		Jumlah laporan koordinasi lintas sektoral dan stakeholder	1 laporan		4 laporan		4 laporan		100.00	#DIV/0!			4.00	400
		Jumlah pelaku usaha pasar daerah yang menerima bantuan sosial	N/A orang	3,808 orang					#DIV/0!	#DIV/0!			3,808.00	#VALUE!
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 dokumen						#DIV/0! dokumen	#DIV/0!	4 dokumen		4.00 dokumen	100
30 03 02	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	27 rekening	14 rekening	20 rekening	2,478,052,789	20 rekening	2,377,675,900	100.00	- 95.95	- -	-	34.00	- 125.93
		Jumlah perlengkapan kebersihan pasar yang Tercukupi	8,996 unit	4,603 unit	4,498 unit		4,498 unit		100.00	- #DIV/0!	- -		9,101.00	- 101.17
		Jumlah laporan koordinasi lintas sektoral dan stakeholder	0 laporan	n/a	12 laporan		12 laporan		100.00	#DIV/0!			12.00	#DIV/0!
		Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi							#DIV/0!	#DIV/0!			-	#DIV/0!
30 04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil	42.87 %	14.29 %	14.29 %	4,188,942,038	14.29 %	243,938,500	100.00 %	5.82	14.29 %	104,487,750	42.87 %	100
30 04	Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi monitoring yang ditindaklanjuti	36 laporan	12 laporan	12 rekening	22,542,250	24 rekening	21,723,750	200.00 laporan	96.37	12 laporan	16,440,300	48.00 laporan	133.33
30 04 01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah peserta sosialisasi Permendag	100 orang	30 orang	30 orang		30 orang		100.00	#DIV/0!	- -	10,554,950	60.00	60

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4					
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	24 laporan	12 laporan	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	12.00	50				
		Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15,941,750	12 laporan	15,748,750	100.00	laporan	98.79	12 laporan		36.00	300				
		Jumlah peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting	450 orang	n/a					#DIV/0!	#DIV/0!			-		0				
30	04	03	Sub Kegiatan Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan monitoring ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	24 laporan	12 laporan	12 laporan	6,600,500	12 laporan	5,975,000	100.00	-	90.52	-	5,885,350	24.00	-	100	
		Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12 laporan						#DIV/0!	laporan	#DIV/0!	12 laporan		12.00	laporan		100		
30	04	Kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kab/kota	Jumlah komoditas bahan pokok dan barang penting yang terkendali harga dan stoknya	9 komoditas	3 komoditas	3 komoditas	4,135,598,938	3 komoditas	196,663,900	100.00	komoditas	4.76	3 komoditas	62,776,550	9.00	komoditas		100	
30	04	02	Sub kegiatan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Jumlah data harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dilaporkan dalam sistem informasi perdagangan	26 data	13 data	13 data	43,131,850	13 data	41,475,500	100.00	-	96.16	-	55,859,600	26.00	-	100	
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan						#DIV/0!	laporan	#DIV/0!	12 laporan		12.00	laporan		100		
30	04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kab/kota	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	5 kali	2 kali	4 kali	4,092,467,088	6 kali	155,188,400	150.00	-	3.79	-	6,916,950	8.00	-	160	
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 laporan						#DIV/0!	laporan	#DIV/0!	2 laporan		2.00	laporan		100		
30	04	Kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, pengadaan dan penyaluran yang ditindaklanjuti	24 laporan	12 laporan	12 laporan	30,800,850	12 laporan	25,550,850	100.00	laporan	82.96	12 laporan	25,270,900	36.00	laporan		150	
30	04	01	Sub Kegiatan Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah rapat koordinasi pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	300 orang	275 orang	12 orang	30,455,750	12 orang	25,205,750	100.00		82.76	-	-	-	287.00		95.67
		Jumlah laporan evaluasi pengawasan pengadaan pupuk bersubsidi	24 laporan	12 laporan	12 laporan			152 laporan			1.266.67	-	#DIV/0!	-	-	164.00	-	683.33	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4	
30 04 03	Sub Kegiatan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah rapat koordinasi pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	24 laporan	12 laporan	120 laporan	345,100	120 laporan	345,100	100.00	-	100	-	25,270,900	132.00	550
		Jumlah laporan evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi	12 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan		100.00	-	#DIV/0!	-		24.00	200
		Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	12 laporan						#DIV/0! laporan	#DIV/0!	12 laporan		12.00 laporan		100
30 05	Program pengembangan ekspor	Persentase pelaku usaha ekspor yang terfasilitasi	300 %	100 %	100 %	116,271,000	100 %	115,093,850	100.00 %	98.99	100 %	393,427,300	300.00 %	100	
30 05	Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi pameran dagang, misi dagang dan kemitraan	248 pelaku usaha	31 pelaku usaha	18 pelaku usaha	116,271,000	16 pelaku usaha	115,093,850	100.00	98.99	197 pelaku usaha	393,427,300	248.00	99.19	
30 05 01	Sub Kegiatan Pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pembinaan pengembangan ekspor impor	20 pelaku usaha	50 pelaku usaha	10 pelaku usaha	9,547,700	10 pelaku usaha	8,387,700	100.00	87.85	-	9,457,800	60.00	300	
		Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	20 pelaku usaha						#DIV/0!	#DIV/0!	20 pelaku usaha		20.00	100	
30 05 02	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	35 pelaku usaha	25 pelaku usaha	6 pelaku usaha	105,000,000	6 pelaku usaha	104,982,850	100.00	100	-	315,532,000	31.00	88.57	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	18 pelaku usaha						#DIV/0! pelaku usaha	#DIV/0!	18 pelaku usaha		18.00 pelaku usaha	100	
30 05 03	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	-	-	-		-		#DIV/0!	#DIV/0!	-	47,049,750	-	#DIV/0!	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	175 pelaku usaha						#DIV/0! pelaku usaha	#DIV/0!	175 pelaku usaha		175.00 pelaku usaha	100	
30 05 04	Sub Kegiatan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti misi dagang	16 pelaku usaha	6 pelaku usaha	2 pelaku usaha	1,723,300	2 pelaku usaha	1,723,300	100.00	100	-	21,387,750	8.00	50	
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pasar lelang	8 pelaku usaha	n/a					#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 pelaku usaha						#DIV/0! pelaku usaha	#DIV/0!	4 pelaku usaha		4.00 pelaku usaha	100	
30 06	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat UTTP yang sesuai standar	288.17 %	101.40 %	96.07 %	230,539,275	116,76 %	205,908,472	121.54 %	89.32	95.77 %	188,453,600	313.93 %	108.94	
		Persentase peningkatan PAD sektor metrologi legal	300 %	117.16 %	100 %		117,65 %		117.65 %	#DIV/0!	100 %		334.81 %	111.60	
30 06	Kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian	77 %	77 %	77 %	230,539,275	77 %	205,908,472	100.00 %	89.32	77 %	188,453,600	231.00 %	300	

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4
30 06 01	Sub Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang	Jumlah alat UTTP yang terstandar	13,500 unit	6,084 unit	3,000 unit		3,503 unit		116.77	#DIV/0!	-	89,281,700	9,587.00	71.01
		Jumlah laporan pelayanan tera	24 laporan	12 laporan			-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		12.00	50
		Jumlah laporan pelayanan tera ulang	24 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan		100.00	#DIV/0!	-		24.00	100
		Jumlah peserta sosialisasi metrologi legal	12 orang	n/a					#DIV/0!	#DIV/0!			-	0
		Jumlah alat standar ukur yang terkalibrasi	500 buah/unit	300 buah/unit	300 buah/unit	120,542,925	300 buah/unit	101,428,200	100.00	84.14	-		600.00	120
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6000 unit						#DIV/0! unit	#DIV/0!	6000 unit		6,000.00 unit	100
30 06 02	Sub Kegiatan Pengawasan / penyuluhan metrologi legal	Jumlah laporan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)	24 laporan	12 laporan	12 laporan	64,219,450	12 laporan	58,808,083	100.00	91.57	-	49,165,900	24.00	100
		Jumlah laporan pengawasan alat UTTP	24 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan		100.00	#DIV/0!	-		24.00	100
		Jumlah laporan pengawasan satuan ukuran (SU)	24 laporan	12 laporan	12 laporan		12 laporan		100.00	#DIV/0!	-		24.00	100
		Jumlah kegiatan penyuluhan kemetrologian yang dilaksanakan	10 kali	6 kali	6 laporan		6 laporan		100.00	#DIV/0!	-		12.00	120
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT yang dilaksanakan	6 orang	50 orang					#DIV/0!	#DIV/0!			50.00	833.33
		Jumlah peserta sosialisasi BDKT yang dilaksanakan	6 orang	50 orang					#DIV/0!	#DIV/0!			50.00	833.33
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	12 orang						#DIV/0! orang	#DIV/0!	12 orang		12.00 orang	100
30 06 03	Sub Kegiatan Penyidikan metrologi legal	Jumlah kasus yang ditangani	2 kasus	2 kasus	2 kasus	45,776,900	2 kasus	45,672,189	100.00	100	-	50,006,000	4.00	200
		Jumlah surat penyidikan yang ditangani	2 dokumen	2 dokumen			-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		2.00	100
		Jumlah pembinaan peraturan penegakan peraturan metrologi legal	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan		4 kegiatan		100.00	#DIV/0!	-		8.00	200
		Jumlah rapat koordinasi dengan penyidik dari instansi luar	8 kali	3 kali	3 kali		3 kali		100.00	#DIV/0!	-		6.00	75
		Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	1 unit				-		#DIV/0!	#DIV/0!	1 unit		1.00	100

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4		
30 07	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Prosentase kelompok usaha yang berorientasi ekspor	13.50 %	4.50 %	4.5 %	21,785,627,637		4.52 %	11,742,411,740		100.44 %	53.90	4.5 %	213,457,950	#VALUE! %	#VALUE!
30 07	Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan	6,469 pelaku usaha	2,656 pelaku usaha	325 pelaku usaha	21,785,627,637		325 pelaku usaha	11,742,411,740		100.00 pelaku usaha	53.90	50 pelaku usaha	213,457,950	3,031.00 pelaku usaha	46.85
30 07 02	Sub Kegiatan Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kab/kota	Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha informal	400 pelaku usaha	30 pelaku usaha	50 pelaku usaha	21,661,456,637		50 pelaku usaha	11,619,195,740		100.00	53.64	-	213,457,950	80.00	20
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi di kawasan agropolitan	110 pelaku usaha	n/a	150 pelaku usaha			150 pelaku usaha			100.00	#DIV/0!		150.00	136.36	
		Jumlah peralatan pendukung sarpras kegiatan yang tercukupi	110 unit	n/a							#DIV/0!	#DIV/0!		-	0.00	
		Jumlah peserta pembinaan pelaku usaha informal	120 pelaku usaha	30 pelaku usaha							#DIV/0!	#DIV/0!	50 pelaku usaha	80.00	66.67	
		Jumlah pelaku usaha informal yang mendapat bantuan sosial	5,809 orang	2,351 orang							#DIV/0!	#DIV/0!		2,351.00	40.47	
		Jumlah pelaku usaha yang mengikuti promosi di kawasan agropolitan	110 pelaku usaha	150 pelaku usaha							#DIV/0!	#DIV/0!		150.00	136.36	
		Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMKM								#DIV/0! UMKM	#DIV/0!	50 UMKM	50.00 UMKM	100	
30 07 03	Sub Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah pelaku usaha pembinaan jaringan informasi perdagangan	100 pelaku usaha	125 pelaku usaha	125 pelaku usaha	124,171,000		125 pelaku usaha	123,216,000		100.00	99.23	-	250.00	250	
		Jumlah peserta temu usaha	2 pelaku usaha	2 pelaku usaha							#DIV/0!	#DIV/0!		2.00	100	
		Jumlah peserta sosialisasi relokasi pelaku usaha informal	10 pelaku usaha	n/a							#DIV/0!	#DIV/0!		-	0	
		Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan									#DIV/0!	#DIV/0!		-	#DIV/0!	
	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian				31,291,970,310			27,656,032,184				926,646,194				
31 02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI	210 %	70 %	70 %	31,130,285,310		70 %	27,501,825,184		100.00 %	88.34	70 %	881,946,744	210.00 %	100
		Produktivitas Tenaga Kerja Industri	1.5 %	0.7 %	0.7			0.7			100.00 %	#DIV/0!	0.7		2.10 %	140
		Persentase Inisiasi tahapan Pembentukan Kawasan Industri	1.1 %	0.5 %	0.6			0.6			100.00 %	#DIV/0!	0.6		1.70 %	154.55
31 02	Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kab/kota	Jumlah tenaga kerja IKM yang terlatih	270 IKM	90 IKM	90 IKM	31,130,285,310		90 IKM	27,501,825,184		100.00 IKM	88.34	90 IKM	881,946,744	270.00 IKM	100

Kode			Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2		3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4	
			Jumlah produk yang difasilitasi standarisasi	492 produk	164 produk	80 produk		80 produk		100.00 produk	#DIV/0!	164 produk		408.00 produk	82.93	
			Tahapan pembentukan kawasan industri	164 tahap	n/a					#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	
			Jumlah sentra industri yang terfasilitasi revitalisasi	2 sentra	1 sentra					#DIV/0!	#DIV/0!	1 sentra		2.00	100	
			Sub Kegiatan Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota	2 dokumen	n/a					#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	
			Jumlah dokumen pengembangan industri hijau yang tersusun	2 dokumen	n/a					#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	
31	02	01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri	Jumlah dokumen pengembangan industri hijau yang tersusun	1 sentra	1 dokumen	-			#DIV/0!	#DIV/0!	-		1.00	100	
			Jumlah bantuan peralatan bagi IKM	2 unit	n/a					#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	
			Jumlah monitoring dan evaluasi perkembangan rencana pengembangan industri kreatif dan industri hijau yang telah disusun	-	20 kali					#DIV/0!	#DIV/0!	-		20.00	#DIV/0!	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilyahan Industri	1 dokumen						#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	
31	02	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah tenaga kerja IKM yang dilatih	50 IKM		-			#DIV/0!	#DIV/0!	-		-	0	
			Jumlah bantuan peralatan bagi IKM	2 unit	n/a					#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	
			Jumlah label produk IKM yang terfasilitasi redesign kemasan	25 label						#DIV/0!	#DIV/0!	-		-	0	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							#DIV/0!	#DIV/0!			-	#DIV/0!	
31	02	04	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah sarana industri yang difasilitasi	66 sentra	64 unit	2 unit	1,653,655,550	2 unit	1,609,883,876	100.00	97.35	-	717,364,294	66.00	100
			Jumlah bantuan peralatan bagi IKM	2 unit	n/a	20 unit		unit		-	#DIV/0!			-	0	
			Jumlah IKM yang terfasilitasi pengurusan HaKI Merek	50 IKM	50 IKM	50 ikM		- ikM		-	#DIV/0!	-		50.00	100	
			Jumlah IKM yang terfasilitasi pengurusan HaKI Cipta	2 IKM	2 IKM	20 ikm		- ikm		-	#DIV/0!	-		2.00	100	
			Jumlah produk yang terfasilitasi pengurusan Uji Nutrisi	20 produk	20 ikm	10 ikM		ikM		-	#DIV/0!	-		20.00	100	

Kode			Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4		
			Jumlah IKM yang terfasilitasi sertifikasi Halal	10 IKM	10 IKM	10 ikm		- ikm		-	#DIV/0!	-		10.00	100	
			Jumlah produk yang terfasilitasi sertifikasi BPOM RI	10 produk	n/a			-		#DIV/0!	#DIV/0!			-	0	
			Jumlah IKM yang tersertifikasi PKP	25 IKM	25 IKM	-		-		#DIV/0!	#DIV/0!	-		25.00	100	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	8 dokumen					#DIV/0! dokumen	#DIV/0!	8 dokumen		8.00 dokumen	100		
31	02	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang terfasilitasi pelatihan	110 IKM	255 IKM	255 ikm	29,476,629,760	255 ikm	25,891,941,308	100.00	87.84	-	164,582,450	510.00	463.64
				Jumlah IKM yang terfasilitasi pelatihan	55 IKM		255 ikm		ikm		-	#DIV/0!		-	0	
				Jumlah dokumen kerjasama mitra strategis untuk IKM	1 Mitra	1 Mitra	1 Mitra		- Mitra		-	#DIV/0!	-	1.00	100	
				Jumlah sentra IKM yang direvitalisasi (DAK)	2 sentra IKM	1 sentra IKM	1 senta IKM		- senta IKM		-	#DIV/0!	-	1.00	50	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen				#DIV/0!	#DIV/0!	1 dokumen		1.00	100		
31	03		Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah	240 %	80 %	70 %	59,508,000	70 %	52,864,000	100.00 %	88.84	80 %	40,309,700	230.00 %	95.83
31	03		Kegiatan penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kab/kota	Persentase verifikasi teknis penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan kabupaten	240 %	80 %	80 %	59,508,000	80 %	52,864,000	100.00 %	88.84	80 %	40,309,700	240.00 %	100
31	03	01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan kab/kota dalam sistem informasi industri nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha	Jumlah dokumen pemeriksaan legalitas ijin usaha industri	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	37,280,000	1 dokumen	31,287,000	100.00	83.92	-	3,750,000	2.00	100
				Jumlah Workshop legalitas Usaha NIB (Nomor Induk Berusaha (TDP, NIK, API))	3						#DIV/0!	#DIV/0!			-	0
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen						#DIV/0!	#DIV/0!	1 dokumen	1.00	100	
31	03	02	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah pengawasan industri legal	50 kali	25 kali	25 kali	22,228,000	25 kali	21,577,000	100.00	97.07	-	36,559,700	50.00	100

Kode			Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator Kinerja	Target kinerja Renstra PD Tahun 2023 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2021)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2)						Target program dan kegiatan Renja Perangkat daerah tahun n-1) (2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1			2	3	4	5	6		7		8=7/6		9		10 = (5+7+9)	11=10/4
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/kota	2 dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	2 dokumen		2.00 dokumen	100	
31	04		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase pengawasan industri dalam SIIINas	240 %	80 %	80 %	102,177,000	80 %	101,343,000	100.00 %	99.18	80 %	4,389,750	240.00 %	100
31	04		Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	102,177,000	1 dokumen	101,343,000	100.00	99.18	1 dokumen	4,389,750	3.00	150
31	04	01	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIIINas)	Jumlah pendataan IKM yang dilakukan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	102,177,000	1 dokumen	101,343,000	100.00	99.18	-	-	2.00	100
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Data ke SIIINas	1 dokumen		-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	0	
31	04	02	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke (SIIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian	1 dokumen					#DIV/0!	#DIV/0!	1 dokumen	4,389,750	1.00	100	
								113,324,659,186		89,816,915,367		79.26		26,190,084,363		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan perangkat daerah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra perangkat daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Pada tabel T-C.30 disajikan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada Renstra perangkat daerah.

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

NO	Indikator Kinerja Utama	SPM/SPK/SDGs	IKK	Realisasi Renstra PD				Target Renstra PD		Keterangan
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai AKIP	-	-	BB	BB	BB	NA	NA	NA	
	Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah	-	-	NA	NA	NA	BB	BB	A	Tahun 2024 target Nilai evaluasi AKIP adalah A dengan angka (80,01)
2	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	-	-	NA	NA	20,05%	21,12%	20%	21,12%	Target tahun 2024 berdasarkan omzet pelaku usaha yang disuport atas aktivitas kegiatan promosi
3	Produktivitas tenaga kerja industri	-	-	NA	NA	NA	0.7 Rp/orang	0,8 Rp/orang	0,8 Rp/orang	Nilai tenaga kerja (jumlah serapan tenaga kerja x UMK Ka.Jombang pada th.N)
4	Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI	-	-	NA	NA	69,51%	70,25%	70%	70%	Tahun 2024 target sebanyak 70% karena yang terfasilitasi belum tentu terbit sertifikat HKI 100% dikarenakan tidak semua lulus
5	Prosentase pertumbuhan pelaku usaha IKM	-	-	NA	NA	NA	81,65%	80%	80%	Bentuk laju pertumbuhan industri

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Dagrin, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu dinas teknis daerah mempunyai peran yang sangat besar sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Jombang.

Berikut ini adalah permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdapat beberapa indikator dalam melaksanakan kinerja pelayanan, diantaranya :

1. Se jauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, antara lain :
 - Rencana Agroindustri yang didorong meliputi industri pendukung produksi pertanian, peternakan serta industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan tanpa limbah
 - Penerapan Sistem Resi Gudang merupakan bentuk upaya memfasilitasi meningkatkan kesejahteraan petani sebagai model pemasaran komoditas pertanian, jatuhnya harga pada saat musim panen raya. Para petani tidak dapat menyimpan hasil panen lebih lama karena sudah kehabisan biaya dan tidak punya gudang yang memadai dan pasar lelang komoditas.
 - Industri berupa industri penghasil peralatan pertanian diarahkan di Bandarkedungmulyo dan industri pendukung produksi pertanian dan peternakan yang menghasilkan limbah kimia diarahkan di kecamatan Ploso.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan misi yang dilaksanakan, adalah sebagai berikut:

Urusan Perdagangan

Permasalahan

- Laporan Ekspor impor yang kurang maksimal
- Pelayanan Tera / tera ulang belum maksimal
- Sarana Perdagangan belum memadai
- Potensi PAD belum terealisasi secara maksimal
- Harga Bapokting Fluktuatif

Faktor Penghambat

- Kurangnya kesadaran dari importir/ eksportir untuk melaporkan usahanya
- Terbatasnya SDM kemetrolagian dan sarana prasarana tera/tera ulang belum memadai
- Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna pasar untuk saling menjaga sarana dan prasarana
- Belum tertibnya pembayaran retribusi oleh pedagang
- Rantai distribusi bapokting yang panjang

Faktor Pendorong

- Pemerintah Pusat/Kementerian memfasilitasi untuk peningkatan SDM melalui diklat kemetrolagian
- Pemerintah Pusat/Kementerian memfasilitasi melalui dana DAK, BK, dan TP
- Bank Daerah melakukan terobosan ERPAS (Elektronik Retribusi Pasar)
- Operasi pasar murah bapokting

Urusan Perindustrian

Permasalahan

- Industri kecil dan menengah masih belum banyak mengakses teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk
- Sektor industri masih belum mampu memaksimalkan penggunaan bahan baku lokal untuk substitusi bahan baku impor (didatangkan dari daerah/negara lain). Akibatnya biaya produksi menjadi relatif lebih tinggi
- Industri kecil dan menengah masih belum banyak melakukan diversifikasi produk.
- Industri kreatif belum dapat berkontribusi secara maksimal terhadap daya saing industri daerah
- Industri kecil dan menengah serta industri kreatif banyak yang terkendala oleh permasalahan modal
- Terbentuknya kawasan industri dan kawasan peruntukan industri harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

Faktor Penghambat

- Penguasaan teknologi masih rendah
- Kualitas produk industri kecil menengah belum semuanya sesuai standard mutu yang berlaku
- Kurangnya inovasi industri kecil dan menengah
- Masih belum terfasilitasi secara maksimal
- Masih lemahnya permodalan yang dimiliki IKM serta kemauan IKM dalam mempraktekkan hasil pelatihan
- Masih terkendala sarana dan prasarana memadai

Faktor Pendorong

- Pemerintah pusat/propinsi memfasilitasi dalam bentuk penerapan teknologi
- Potensi Sumber Daya Alam yang memadai
- Pemerintah pusat/propinsi memfasilitasi dalam bentuk pelatihan pelatihan
- Beberapa kabupaten/kota bekerjasama dengan instansi pusat dan/atau provinsi melakukan link and match dengan investor
- Beberapa lembaga keuangan memfasilitasi pemodolan melalui kredit usaha
- Pemerintah Pusat/Kementerian sudah memfasilitasi untuk pembentukan kawasan industri

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
- Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
- Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri
- Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, Sistem Resi Gudang (SRG) dan pasar lelang
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
- Meningkatnya peran industri dalam perekonomian nasional
- Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
- Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri
- Meningkatnya peran IKM dalam perekonomian nasional
- Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
- Meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri
- Menguatnya struktur industri

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang, yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Berikut uraian yang telah teridentifikasi:

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan (<i>Strength</i>) - S	Kelemahan (<i>Weakness</i>) - W
- Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Pelaku Usaha UKM/IKM	- Kualitas dan kuantitas SDM pengawasan dan pembinaan pelaku usaha UKM/IKM berkompetensi dibidangnya - Kurangnya Petugas Pengawas Kemetrologian yang memiliki kapabilitas
- Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Perdagangan dan Perindustrian antara lain eR-Pas (elektronik retribusi pasar), Simoleg (Sistem Informasi Metrologi Legal), Saudagar (Sistem Administrasi Usaha dan Pengendalian Harga Pasar) serta SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional) untuk mempermudah dan mempercepat proses penyampaian data yang berasal dari dunia usaha kepada pemerintah	- Belum tersedianya data demografi tentang pelaku usaha perdagangan (PKL, Pasar, UKM/IKM) di Kabupaten Jombang

- Perhatian dan dukungan Pemerintah dalam penyediaan fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha, Pasar dan Sentra UKM/IKM	- Lokasi dan aksesibilitas fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha (PKL, Pasar dan Sentra UKM/IKM) yang kurang strategis dan sarana prasarana pendukung yang belum optimal
- Ketersediaan Dasar Hukum, Standar Operasional Prosedur (SOP), Peraturan dan Pedoman tentang Perdagangan dan Perindustrian	- Kualitas produk IKM yang belum optimal untuk bersaing dengan produk usaha lainnya
- Koordinasi yang baik dengan instansi vertikal maupun horizontal	- Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan barang pokok dan penting lainnya

FAKTOR EKSTERNAL

Peluang (*Opportunities*) - O

Ancaman (*Threats*) - T

- Posisi Strategis Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten Penghubung	- Dinamika perkembangan perdagangan global dan aspek legalitas yang mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum
- Pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan dan pelaku usaha industri	- Sudah banyaknya berdiri yayasan lembaga perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Jombang;
- Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktifitas usaha dan industri	- Meningkatnya persaingan antar para pelaku usaha baik sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pelaku usaha kecil, menengah dan besar
- Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif	- Para pelaku IKM kurang dapat atau terhambat mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin bertambah maju di era globalisasi
- Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan UKM/IKM ditingkat regional, nasional dan internasional	- Pertumbuhan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) pada lokasi – lokasi fasilitas umum dan ruang publik
	- Kurangnya kepedulian masyarakat pengguna pasar daerah mengakibatkan kurang terjaganya kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah
	- Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah yang dapat mengganggu produktivitas dan pemasaran produk usaha UKM/IKM
	- Adanya pemberlakuan FTA (Free Trade Agent) yang megancam keberlangsungan produk dalam negeri
	- Beredarnya produk impor yang belum memiliki standar dan mulai berdirinya minimarket waralaba yang dimiliki perorangan/swasta
	- Adanya peningkatan penerapan NTBs (Non Tarif Barriers) di negara-negara tujuan ekspor guna melindungi produk mereka

- Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha UKM/IKM	- Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya
- Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha UKM/IKM	- Keterbatasan akses permodalan pelaku usaha UKM/IKM
- Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan platform ekonomi digital yang masif	- Sinkronisasi dan Integrasi data perizinan dengan Pusat
- Pembangunan infrastruktur jalan secara pesat memiliki dampak ekonomi besar, antara lain dalam peningkatan perdagangan dan pergudangan serta peningkatan ekonomi kreatif dan pengembangan usaha UKM/IKM	- Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta kepatuhan terhadap peraturan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun 2024, antara lain dengan :

- 1) Pembangunan dan revitalisasi pasar daerah,
- 2) Upaya pembentukan PD Pasar,
- 3) Upaya penyertaan Modal kepada BUMD,
- 4) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UM dan IKM melalui akses permodalan
- 5) Meningkatkan daya saing daerah, diprioritaskan pada upaya-upaya untuk meningkatkan potensi unggulan daerah yang berdaya saing dengan meningkatkan jaringan distribusi produk,
- 6) Pengembangan IKM dan meningkatkan struktur industri mulai dari industri hulu dan hilir.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses

perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Dalam proses perencanaan awal program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2023 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pada tabel T-C.31 disajikan review rincian program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat perubahan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berdasarkan indikator kinerja.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian				21.827.998.917,00				21.827.998.917,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.827.998.917,00				21.827.998.917,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				19.772.733.917,00				19.772.733.917,00
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur		100 persen	11.199.080.295,00			100 persen	11.199.080.295,00
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan		8 Dokumen	15.218.742,00			8 Dokumen	15.218.742,00
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	3 Dokumen	7.650.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	7.650.300,00
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Jombang	5 Laporan	7.568.442,00			5 Laporan	7.568.442,00
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		12 bulan	9.190.036.333,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 bulan	9.190.036.333,00
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	58 Orang/bulan	8.862.402.333,00			58 Orang/bulan	8.862.402.333,00
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	12 Dokumen	323.418.000,00			12 Dokumen	323.418.000,00
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	1 Laporan	2.216.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.216.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kab. Jombang	17 Laporan	2.000.000,00			17 Laporan	2.000.000,00
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	10.000.000,00
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	4 Laporan	10.000.000,00				
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		12 bulan	34.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 bulan	34.800.000,00
3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	58 Paket	34.800.000,00				
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan	691.092.020,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 bulan	691.092.020,00
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	25 Paket	33.757.800,00			25 Paket	33.757.800,00
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	61 Paket	45.767.950,00				
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jombang	9 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Paket	0,00
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	6 Paket	240.208.470,00			6 Paket	240.208.470,00
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	13 Paket	211.365.800,00				
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Dokumen	99.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	99.870.000,00
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	14 Laporan	60.122.000,00			14 Laporan	60.122.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur		2 unit	0,00				
3	30	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	0,00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah		12 bulan	874.303.200,00				
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	353.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	353.400.000,00
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	520.903.200,00				
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik		129 unit	383.630.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		129 unit	383.630.000,00
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1 Unit	38.610.000,00				
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	23 Unit	217.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23 Unit	217.780.000,00
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	1 Unit	0,00				
3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	40 Unit	127.240.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Unit	127.240.000,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan		100 persen	11.072.500,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan		6 dokumen	4.185.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 dokumen	4.185.000,00
3	30	02	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Jombang	4 Dokumen	4.185.000,00				
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-		--	3.165.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		--	3.165.000,00
3	30	02	2.02	0001	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Jombang	8 Dokumen	3.165.000,00			8 Dokumen	3.165.000,00
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan		4 Dokumen	3.722.500,00				
3	30	02	2.03	0001	Facilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Jombang	4 Dokumen	3.722.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	3.722.500,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah		100 persen	5.546.000.172,00			100 persen	5.546.000.172,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi		16 pasar daerah	5.414.399.670,00				
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	18 Unit	2.413.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Unit	2.413.200.000,00
3	30	03	2.01	0002	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	16 Unit	3.001.199.670,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar		77 persen	131.600.502,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		77 persen	131.600.502,00
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	12 Dokumen	92.268.502,00			12 Dokumen	92.268.502,00
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	2 Dokumen	39.332.000,00				
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil		14.29 persen	2.082.398.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14.29 persen	2.082.398.750,00
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapokting yang ditindaklanjuti		12 Laporan	6.926.500,00				
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang	12 Laporan	4.158.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	4.158.000,00
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang, Jombang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.768.500,00				
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas bapokting yang terkendali		3 komoditas	2.048.868.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 komoditas	2.048.868.300,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Jombang	13 Laporan	45.784.700,00				
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	8 Laporan	2.003.083.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Laporan	2.003.083.600,00
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti		12 laporan	26.603.950,00			12 laporan	26.603.950,00
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Jombang	12 Laporan	26.603.950,00			12 Laporan	26.603.950,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi		100 persen	612.982.400,00				
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang		410 pelaku usaha	612.982.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		410 pelaku usaha	612.982.400,00
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Jombang, Jombang, Semua Kel/Desa	8 Pelaku Usaha	335.568.000,00				
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Jombang	345 Pelaku Usaha	254.432.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		345 Pelaku Usaha	254.432.000,00
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Jombang, Luar Kab. Jombang	12 Pelaku Usaha	22,982,400.00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar		96.85 persen	209.999.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		96.85 persen	209.999.900,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrologian		77 persen	209.999.900,00			77 persen	209.999.900,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Jombang	3000 Unit	165.599.900,00			3000 Unit	165.599.900,00
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Jombang	12 Orang	44.400.000,00				
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi		4.5 persen	111.199.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4.5 persen	111.199.900,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan		50 UMKM	111.199.900,00				
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kab. Jombang	50 UMKM	111.199.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		50 UMKM	111.199.900,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.055.265.000,00				2.055.265.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produktivitas tenaga kerja industri		0.8 Rp/orang	2.011.265.000,00				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan		4 Dokumen	2.011.265.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	2.011.265.000,00
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Jombang	1 Dokumen	50.000.000,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Jombang, Jombang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Jombang	8 Dokumen	1.569.868.400,00			8 Dokumen	1.569.868.400,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Jombang	1 Dokumen	291.396.600,00			1 Dokumen	291.396.600,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah		80 persen	14.000.000,00				
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan		1 Dokumen	14.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	14.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Jombang	1 Dokumen	7.000.000,00				
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1 Dokumen	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	7.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengawasan industri dalam SIINas		80 persen	30.000.000,00			80 persen	30.000.000,00
3	31	04	2.01		Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten		2 Dokumen	30.000.000,00			2 Dokumen	30.000.000,00
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Jombang	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Jombang	1 Dokumen	25.000.000,00				
									21.827.998.917,00				21.827.998.917,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat yang terkait dengan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Disdagrin. Usulan yang ditelaah merupakan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun stakeholder. Usulan tersebut terdiri dari usulan yang langsung ditujukan kepada Disdagrin. Usulan dari para pemangku kepentingan tahun 2024, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memenuhi salah satu amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu adanya kegiatan yang didanai dari dana bagi hasil cukai tembakau sesuai kewenangan Disdagrin;
2. Penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan sector industri dan perdagangan perlu mempertimbangkan adanya usulan pokok-pokok pikiran Dewan yang saat ini sedang dalam proses verifikasi;
3. Dalam rangka peningkatan efektifitas pembinaan pelaku usaha sektor perdagangan dan industri, perlu adanya perbaikan data sektor dimaksud melalui kegiatan pendataan dan pembangunan database pelaku usaha sektor industri dan perdagangan;
4. Dalam rangka peningkatan pemasaran produk-produk pelaku usaha (UM/IKM) diperlukan penambahan beberapa kegiatan, yaitu: pembangunan *marketplace* bagi pelaku usaha, penyelenggaraan pelatihan/pembinaan produk lokal dan produk ekspor yang melibatkan pelaku ekspor senior di Kabupaten Jombang sebagai instruktur nya dan peningkatan kecintaan produk Jombang bagi masyarakat Kabupaten Jombang;
5. Pengembangan sektor industri dan perdagangan memerlukan kerjasama lintas sektor, diantaranya dalam penumbuhan wirausaha baru dan peningkatan kemampuan manajemen pelaku usaha sektor industri dan perdagangan.

Pada tabel T-C.32 disajikan usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Disdagrin.

Tabel T-C.32 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Jombang	Jumlah Paket Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	58 stel	Seragam Olah Raga (pegawai Disdagrin)
2.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	Sarpras playground PKL
3.	Pameran Dagang Nasional	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	1 paket	Hibah dan Operasional Dekranasda Kabupaten Jombang
4.	Pameran Dagang Lokal	Kab. Jombang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	50 pelaku usaha	Festival makanan tradisional
5.	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Jombang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak	1 paket	Lintas sektoral (TPID Kab.Jombang)
6.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 paket	Pokir Hibah pada kelompok usaha (KUB), Pokmas
7.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Jombang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 paket	De Mapan Pelatihan Kripik, Pelatihan Foto Produk, Fasilitasi HKI, Fasilitasi PKP, Video Profil, SIINas
8.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Jombang	Jumlah bantuan peralatan bagi IKM	1 paket	DBHCHT Inkubator Bisnis kue tradisional

Penyusunan program kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dilakukan dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh berbagai stakeholder. Dari berbagai usulan kegiatan tersebut kemudian ditentukan kegiatan-kegiatan prioritas. Penentuan kegiatan-kegiatan prioritas tersebut, dilakukan dengan memperhatikan tema pembangunan daerah Kabupaten Jombang TA. 2023, prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang bersifat *top down*, sinergitas dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan isu-isu aktual.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Perdagangan	Strategis	Arah Kebijakan
Kementerian Perdagangan	1) Mengamankan pangsa ekspor dipasar utama	Pengembangan dan pengamanan pasar tujuan ekspor
	2) Meningkatkan diversifikasi produk ekspor	
	3) Memperluas tujuan ekspor ke pasar prospektif	
	1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan	Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok
	2) Meningkatkan koordinasi dan peran pemerintah daerah dalam kelancaran distribusi	
	1) Meningkatkan akurasi data harga barang kebutuhan pokok	Pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
	2) Meningkatkan koordinasi dan pengawasan barang kebutuhan pokok	
	3) Mengoptimalkan pengelolaan impor barang kebutuhan pokok	
	1) Meningkatkan edukasi konsumen	Peningkatan pemberdayaan konsumen
	2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan konsumen	
Kementerian Perindustrian	1) Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri	Pembinaan dan penanganan pasar dalam negeri
	2) Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas K/L dan daerah dalam mendukung implementasi sistem logistik nasional yang efektif dan efisien	
	1) Meningkatkan daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas	Pengembangan sumber daya industri
	2) Penguatan implementasi making Indonesia 4.0	
	3) Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	
	1) Pengembangan standardisasi industri	Pengembangan sarana dan prasarana industri
	2) Pengembangan infrastruktur industri	
	3) Pengembangan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Timur	Strategis	1) Pengembangan industri kecil dan menengah 2) Pengembangan industri hijau 3) Pengembangan industri strategis 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) 5) Kerjasama internasional di bidang industri	Arah Kebijakan Pemberdayaan industri
		1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) 2) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 3) Kawasan Industri (KI) 4) Pembangunan atau revitalisasi sentra IKM	Pengembangan perwilayahan industri
	Urusan Perindustrian	1) Peningkatan produktivitas industri agro 2) Peningkatan produktivitas industri non-agro 3) Peningkatan kebijakan industri dan perdagangan 4) Peningkatan teknologi industri dan standarisasi	Meningkatkan produktivitas industri agro Jawa Timur Meningkatkan produktivitas industri non-agro Jawa Timur Optimalisasi struktur industri dan perdagangan Meningkatkan teknologi industri dan standarisasi di Jawa timur
	Urusan Perdagangan	1) Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor 2) Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 3) Peningkatan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga 4) Peningkatan pelayanan dibidang penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi	Meningkatkan Ekspor dan Pengendalian Impor Meningkatkan efisiensi perdagangan dalam negeri Meningkatkan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga Meningkatkan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi Jawa Timur
Pemerintah Kabupaten Jombang		1) Kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter 2) Penguatan daya saing	Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang	Urusan perdagangan	1) Peningkatan efektivitas perencanaan dan pelaporan, Peningkatan efektivitas kinerja perangkat daerah.	Meningkatnya efektivitas penyusunan Renstra, Renja dan Lakip; Mengembangkan layanan prima dalam pelayanan publik.

Strategis

2) Melakukan operasi pasar;
Pemantauan dan pelaporan harga;
Pengawasan UTTP; Meningkatkan
jumlah pelayanan tera dan tera
ulang.

3) Peningkatan sarpras perdagangan;
Melakukan pendataan potensi pasar
dan kemetrolagian.

Urusan perindustrian :

1) Peningkatan daya saing;

2) Mendorong industri kecil dan
menengah yang memiliki nilai ekspor
dan bernilai tambah tinggi secara
progresif

Arah Kebijakan

Melakukan operasi pasar
sebagai respon atas terjadinya
kenaikan harga/dan atau
sebagai antisipasi potensi
kenaikan harga; Menyusun
database potensi UTTP dan
memperbarui secara berkala;
Peningkatan perlindungan
konsumen, standardisasi UTTP
dan pengamanan perdagangan.

Peningkatan sarana dan
prasarana perdagangan
terutama pasar daerah;
Melakukan e-retribusi pasar.

Peningkatan daya saing
industri melalui peningkatan
kemampuan teknologi industri,
sumberdaya manusia industri,
pengembangan inovasi dan
standardisasi produk industri;
Pengembangan industri kreatif.

Mengembangkan akses
informasi dan pemasaran luar
negeri bagi IKM yang memiliki
nilai ekspor tinggi dan nilai
tambah tinggi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melalui program/kegiatannya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80,05 (A)
2.	Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan	Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan	21,12%
3.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Produktivitas tenaga kerja industri	70%
			Prosentase produk yang sudah terstandarisasi dan HKI	70,25%
			Prosentase pertumbuhan pelaku usaha IKM	81,65%

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 sebagaimana tujuan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam Urusan Perdagangan yaitu **Meningkatkan daya saing ekonomi daerah yang berkelanjutan** dengan indikator tujuan "Pertumbuhan ekonomi Daerah" dan dalam Urusan Perindustrian yaitu **Meningkatnya Nilai Tambah Produk Perdagangan dan Industri Kecil dan Menengah** dengan indikator tujuan "Produktivitas IKM."

Guna mendukung tujuan dan sasaran RPJM periode Tahun 2024-2026 Kabupaten Jombang, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan 10 program yang terdiri atas 1 program rutin dan 9 program non rutin, 21 kegiatan yang terdiri atas 7 kegiatan rutin dan 15 kegiatan non rutin dan 54 sub kegiatan yang terdiri atas (24 sub kegiatan rutin dan 30 sub kegiatan non rutin yang akan dilaksanakan pada tahun 2024).

Kegiatan pembangunan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 dilaksanakan Dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang melaksanakan tema pembangunan ke-3 yaitu **Memperkuat Infrastruktur Berkelanjutan Untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah** dalam kegiatan strategis daerah yaitu Revitalisasi/Permbangunan Infrastruktur Ekonomi (Revitalisasi/Pembangunan Lanjutan Pasar) dan Penuntasan Penataan *Junction Local Street Food*/Sentra Pedagang Kaki Lima (Penataan Sentra Kuliner bagi PKL).

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang memperhatikan beberapa faktor, diantaranya: kebijakan Nasional, RPJP, RPJM, dan Renstra OPD. Secara garis besar usulan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian diusulkan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 21.827.998.917,00 yang bersumber pada APBD Kabupaten Jombang. Lokasi sasaran dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah Kabupaten Jombang dan Luar Kabupaten.

Pada tabel T-C.33 disajikan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dinas Perdagangan dan Perindustrian				21.827.998.917,00				21.827.998.917,00
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				21.827.998.917,00				21.827.998.917,00
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				19.772.733.917,00				19.772.733.917,00
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur		100 persen	11.199.080.295,00			100 persen	11.199.080.295,00
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan		8 Dokumen	15.218.742,00			8 Dokumen	15.218.742,00
3	30	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Jombang	3 Dokumen	7.650.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	7.650.300,00
3	30	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Jombang	5 Laporan	7.568.442,00			5 Laporan	7.568.442,00
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu		12 bulan	9.190.036.333,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 bulan	9.190.036.333,00
3	30	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Jombang	58 Orang/bulan	8.862.402.333,00			58 Orang/bulan	8.862.402.333,00
3	30	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Jombang	12 Dokumen	323.418.000,00			12 Dokumen	323.418.000,00
3	30	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Jombang	1 Laporan	2.216.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	2.216.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Kab. Jombang	17 Laporan	2.000.000,00			17 Laporan	2.000.000,00
3	30	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	10.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	10.000.000,00
3	30	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Jombang	4 Laporan	10.000.000,00				
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		12 bulan	34.800.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 bulan	34.800.000,00
3	30	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Jombang	58 Paket	34.800.000,00				
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan	691.092.020,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 bulan	691.092.020,00
3	30	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	25 Paket	33.757.800,00			25 Paket	33.757.800,00
3	30	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	61 Paket	45.767.950,00				
3	30	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Jombang	9 Paket	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		9 Paket	0,00
3	30	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	6 Paket	240.208.470,00			6 Paket	240.208.470,00
3	30	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Jombang	13 Paket	211.365.800,00				
3	30	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Dokumen	99.870.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	99.870.000,00
3	30	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Jombang	14 Laporan	60.122.000,00			14 Laporan	60.122.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur		2 unit	0,00				
3	30	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Jombang	2 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	0,00
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan penunjang kantor urusan pemerintah daerah		12 bulan	874.303.200,00				
3	30	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	353.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	353.400.000,00
3	30	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Jombang	12 Laporan	520.903.200,00				
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik		129 unit	383.630.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		129 unit	383.630.000,00
3	30	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Jombang	1 Unit	38.610.000,00				
3	30	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Jombang	23 Unit	217.780.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		23 Unit	217.780.000,00
3	30	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	1 Unit	0,00				
3	30	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Jombang	40 Unit	127.240.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		40 Unit	127.240.000,00
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan		100 persen	11.072.500,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah ijin usaha perdagangan yang diterbitkan		6 dokumen	4.185.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		6 dokumen	4.185.000,00
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Jombang	4 Dokumen	4.185.000,00				
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	-		- -	3.165.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		- -	3.165.000,00
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kab. Jombang	8 Dokumen	3.165.000,00			8 Dokumen	3.165.000,00
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah rekomendasi ijin usaha Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang diterbitkan		4 Dokumen	3.722.500,00				
3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Jombang	4 Dokumen	3.722.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		4 Dokumen	3.722.500,00
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase realisasi PAD sektor pasar daerah		100 persen	5.546.000.172,00			100 persen	5.546.000.172,00
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yang dicukupi		16 pasar daerah	5.414.399.670,00				
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	18 Unit	2.413.200.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Unit	2.413.200.000,00
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	16 Unit	3.001.199.670,00				

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Tingkat kepuasan kinerja personalia pengelola pasar daerah terhadap pedagang pasar		77 persen	131.600.502,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		77 persen	131.600.502,00
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	12 Dokumen	92.268.502,00			12 Dokumen	92.268.502,00
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Jombang	2 Dokumen	39.332.000,00				
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting yang stabil		14.29 persen	2.082.398.750,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		14.29 persen	2.082.398.750,00
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah hasil monitoring ketersediaan bapakting yang ditindaklanjuti		12 Laporan	6.926.500,00				
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang	12 Laporan	4.158.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		12 Laporan	4.158.000,00
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Jombang, Jombang, Semua Kel/Desa	12 Laporan	2.768.500,00				
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah komoditas bapakting yang terkendali		3 komoditas	2.048.868.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 komoditas	2.048.868.300,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Jombang	13 Laporan	45.784.700,00				
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	8 Laporan	2.003.083.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		8 Laporan	2.003.083.600,00
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pengawasan, penyaluran yang ditindaklanjuti		12 laporan	26.603.950,00			12 laporan	26.603.950,00
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Jombang	12 Laporan	26.603.950,00			12 Laporan	26.603.950,00
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Peningkatan ekspor pelaku usaha yang terfasilitasi		100 persen	612.982.400,00				
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi dan misi dagang		410 pelaku usaha	612.982.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		410 pelaku usaha	612.982.400,00
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kab. Jombang, Jombang, Semua Kel/Desa	8 Pelaku Usaha	335.568.000,00				
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kab. Jombang	345 Pelaku Usaha	254.432.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		345 Pelaku Usaha	254.432.000,00
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kab. Jombang, Luar Kab. Jombang	12 Pelaku Usaha	22,982,400.00				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang sesuai standar		96.85 persen	209.999.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	96.85 persen	209.999.900,00
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Tingkat kepuasan pengguna layanan kemetrolgian		77 persen	209.999.900,00		77 persen	209.999.900,00
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Jombang	3000 Unit	165.599.900,00		3000 Unit	165.599.900,00
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Jombang	12 Orang	44.400.000,00			
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi		4.5 persen	111.199.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4.5 persen	111.199.900,00
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi promosi perdagangan		50 UMKM	111.199.900,00			
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Kab. Jombang	50 UMKM	111.199.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50 UMKM	111.199.900,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			2.055.265.000,00				2.055.265.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Produktivitas tenaga kerja industri		0.8 Rp/orang	2.011.265.000,00			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kegiatan		4 Dokumen	2.011.265.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Dokumen	2.011.265.000,00
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Jombang	1 Dokumen	50.000.000,00			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Jombang, Jombang, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	100.000.000,00
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Jombang	8 Dokumen	1.569.868.400,00			8 Dokumen	1.569.868.400,00
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Jombang	1 Dokumen	291.396.600,00			1 Dokumen	291.396.600,00
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase fasilitasi legalitas industri sesuai standar dan sesuai kewenangan daerah		80 persen	14.000.000,00				
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang diterbitkan		1 Dokumen	14.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	14.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab. Jombang	1 Dokumen	7.000.000,00				
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Jombang	1 Dokumen	7.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	7.000.000,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja Capaian	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengawasan industri dalam SIINas		80 persen	30.000.000,00			80 persen	30.000.000,00
3	31	04	2.01		Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten		2 Dokumen	30.000.000,00			2 Dokumen	30.000.000,00
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Jombang	1 Dokumen	5.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	5.000.000,00
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab. Jombang	1 Dokumen	25.000.000,00				
									21.827.998.917,00				21.827.998.917,00

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka penyajian program kegiatan dan pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang pada tahun anggaran 2024.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Adapun Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Berikut tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 yang berisi rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana indikator kinerja serta dana indikatif dengan target sasaran sebagai berikut :

Rencana Program dan Kegiatan Dengan Dana Indikatif

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 050-5889 Tahun 2021 tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana total kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya adalah sebagai berikut :

SASARAN-1 :

MENINGKATNYA OMZET PELAKU USAHA PERDAGANGAN

Yang didukung atas program :

1. Program perijinan dan pendaftaran perusahaan

a. Kegiatan Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan

Pagu anggaran : Rp. 4.185.000,00

Sub Kegiatan Fasilitas pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko

Indikator : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (1 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang

Schedule : Bulan Januari s/d Desember

b. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Pagu anggaran : Rp. 3.165.000,00

Sub Kegiatan Fasilitas penerbitan Tanda Daftar Gudang

Indikator : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (8 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang

Schedule : Bulan Januari s/d Desember

c. Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

Pagu anggaran : Rp. 3.722.500,00

Sub Kegiatan Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik

Indikator : Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik (4 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang

Schedule : Bulan Januari s/d Desember

2. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pagu anggaran : Rp. 5.414.399.670,00

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (18 unit)

Lokasi : Kab.Jombang

Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator : Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (16 unit)

Lokasi : Kab.Jombang

Schedule : Bulan Januari s/d Desember

b. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Pagu anggaran : Rp. 131.600.502,00

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (12 dokumen)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (2 dokumen)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

3. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

a. Kegiatan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kab/kota

Pagu anggaran : Rp. 6.926.500,00

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Indikator : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (12 laporan)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Indikator : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (12 laporan)
Lokasi : Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

b. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : Rp. 2.048.868.300,00

Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan

Indikator : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (13 laporan)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (8 laporan)

Lokasi : Kab. Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : Rp. 26.603.950,00

Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Indikator : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (12 laporan)

Lokasi : Kab. Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

4. Program pengembangan ekspor

a. Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota

Pagu anggaran : Rp. 612.982.400,00

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina (10 pelaku usaha)

Lokasi : Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

Indikator : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (8 pelaku usaha)

Lokasi : Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal

Indikator : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (345 pelaku usaha)

Lokasi : Kab. Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan

Indikator : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (12 pelaku usaha)

Lokasi : Kab. Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

5. Program standarisasi dan perlindungan konsumen

a. Kegiatan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan

Pagu anggaran : Rp. 209.999.900,00

Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Indikator : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (3.000 unit)

Lokasi : Kab. Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Indikator : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (12 orang)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

6. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

a. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pagu anggaran : Rp. 111.199.900,00

Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (50 UMKM)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

SASARAN-2 :

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN IKM

Yang didukung atas program :

7. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : Rp. 2.011.265.000,00

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (1 dokumen)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (1 dokumen)
Lokasi : Kab. Jombang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (8 dokumen)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (1 dokumen)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

8. Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Pagu anggaran : Rp. 14.000.000,00

Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base

Indikator : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (1 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota (1 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

9. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional

a. Kegiatan Kegiatan Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kab/kota

Pagu anggaran : Rp. 30.000.000,00

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (1 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (1 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran : Rp. 15.218.742,00

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (3 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (5 laporan)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pagu anggaran : Rp. 9.190.036.333,00

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (58 org/bln)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (12 dokumen)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 laporan)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (17 laporan)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

c. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 10.000.000,00

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (4 laporan)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

d. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 34.800.000,00

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (58 paket)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

e. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 691.092.020,00

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (25 paket)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (61 paket)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (9 paket)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (6 paket)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (13 paket)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (2 dokumen)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (14 laporan)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran : Rp. 874.303.200,00

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (12 laporan)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (12 laporan)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pagu anggaran : Rp. 383.630.000,00

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (1 unit)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (23 unit)
Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (40 unit)

Lokasi : Kab.Jombang
Schedule : Bulan Januari s/d Desember

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) total anggaran indikatif sebesar Rp. 21.827.998.917,00. (*Dua Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*) dalam rangka akuntabilitas proses perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya diproses menggunakan Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang tertuang dalam sistem aplikasi SIPD (Sistem Informasi Perencanaan) Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Pengarustamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Dalam rencana kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender dengan harapan penyusunan Pengarustamaan Gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas (baik laki-laki maupun perempuan).

Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.

Pengarustamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan gertinggal dibandingkan jenis kelamin lainnya (laki-laki lebih banyak dari perempuan atau sebaliknya).

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang

setara dan adil dari pembangunan. Adapun indikator kesetaraan gender adalah sebagai berikut :

1. AKSES; peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
2. PARTISIPASI; merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
3. KONTROL; penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan.
4. MANFAAT; kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil organisasi memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang sudah melaksanakan rencana program dan kegiatan dalam pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 dijelaskan bahwa : (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan berspektif gender dilakukan melalui analisis gender. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 disebutkan bahwa hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan selanjutnya hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Dalam rencana kerja Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah menyusun dan menganggarkan program dan kegiatan yang berbasis Gender melalui sub kegiatan Pameran Dagang Lokal dengan aktivitas Festival Romadhon dan Festival makanan tradisional; sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri dengan aktivitas Hibah pada kelompok usaha (KUB), Pokmas; sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan aktivitas Pelatihan Kripik, Pelatihan Foto Produk, Fasilitasi HKI, Fasilitasi PKP, Video Profil, SIINas. Adapun besaran kebutuhan anggaran sebanyak Rp. 2.115.697.000,00. berdasarkan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas (gender baik laki-laki maupun perempuan).

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang sebagaimana pasal 342 ayat (4), Perubahan tersebut juga dalam rangka penyesuaian tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka dalam Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan upaya dalam rangka mendukung program pembangunan daerah, pembangunan Propinsi serta pembangunan Nasional, guna mengukur pencapaian sasaran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas sangat tergantung pada komitmen dari kepemimpinan, konsistensi dan kebijakan serta peran aktif seluruh civitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

Pelayanan di sektor perdagangan diupayakan melalui rekomendasi ijin pelaku usaha, pembinaan promosi dan pemasaran, peningkatan ekspor perdagangan kegiatan promosi melalui pameran produk, yaitu memfasilitasi para pelaku usaha dalam memasarkan produk mereka sebagaimana indikator Pertumbuhan omzet pelaku usaha perdagangan. Pengelolaan pasar daerah, pendapatan selalu diupayakan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan, karena hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah dan memperkuat posisi keuangan daerah, dan sudah dilakukan terobosan baru dengan menerapkan aplikasi e-retribusi yang bekerjasama dengan Perbankan. Kemetrolagian difokuskan pada pelayanan tera dan tera ulang (UTTP), pengawasan dan pengendalian peredaran barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), serta alat kemetrolagian yang terkalibrasi guna mendapatkan alat UTTP yang sesuai standar.

Pelayanan di sektor perindustrian sebagaimana indikator Meningkatnya Pertumbuhan IKM lebih banyak kepada pelatihan, pendampingan dan fasilitasi terhadap IKM dalam pengembangan usaha. Pelatihan yang dilakukan mencakup pelatihan proses produksi, desain dan kemasan, motivasi, manajemen usaha, peningkatan keterampilan, sampai pada peningkatan teknologi. Untuk fasilitasi yang diberikan antara lain fasilitasi kerjasama kemitraan, hak merk/sertifikasi halal, fasilitasi pengembangan teknologi, desain dan kemasan yang berkolaborasi dengan kegiatan perdagangan pada fasilitasi promosi dan pemasaran. Ada beberapa hal terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dan ataupun sasaran kinerja dalam Tahun 2024 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

dalam kaidah-kaidah pelaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian dan rencana tindak lanjut guna kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah terprogram, diantaranya :

a. Fungsi pelayanan

- Perkembangan perdagangan diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan pokok, bahan penting serta strategis yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat.
- Iklim usaha yang kondusif, informasi yang transparan guna menunjang kelancaran kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri.
- Pasar Daerah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Jombang yang harus diberdayakan dan sebagai bisnis jasa maka harus dikelola dengan baik dengan standar pelayanan yang memenuhi kualitas. Sarana prasarana pasar yang belum memadai diupayakan untuk selalu diperbaiki diantaranya melalui pemeliharaan dan rehabilitasi pasar daerah, dalam hal ini ketersediaan anggaran belum sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Daerah Kabupaten Jombang.
- Kemetrolagian merupakan bidang pelayanan tera/tera ulang dalam mewujudkan pasar tertib ukur dan daerah tertib ukur.
- Pengembangan IKM secara nyata akan terintegrasi dalam kemajuan teknologi basis produksi dan daya saing industri.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

- Didalam pengelolaan pasar sangat diperlukan, terlebih pasar dipandang sebagai salah satu unit usaha agribisnis yang mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam pola atau tata perdagangan dan distribusi barang.
- Diperlukan integrasi dan sinergi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Peningkatan peran sektor perdagangan dan industri.

c. Rencana tindak lanjut

- Guna mencapai pengelolaan pasar daerah dan pasar tertib ukur yang efektif, efisien dan ekonomis harus di dukung oleh beberapa aspek, diantaranya adalah sumber daya manusia, koordinasi lintas sektoral, kualitas pelayanan, kesadaran wajib retribusi pasar dan kemetrolagian dan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar rujukan pencapaian pelayanan.

- Inovasi yang dicanangkan diantaranya Penerapan eRPAS (elektronik retribusi pasar), Simoleg (Sistem informasi kemetrolagian), Saudagar (Sistem Administrasi Daftar Harga).
- Mengimplementasikannya dalam kegiatan pelatihan, pembinaan, rekomendasi ijin dan fasilitasi standardisasi produk IKM sehingga industri kecil menengah mampu berdaya saing.

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN JOMBANG



Drs. SUWIGNYO, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196601161992031001